STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Chika Chairunisa Imron
NPP. 33.0286
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: chikachairunisaaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Gatiningsih, M.T
Email: gatiningsih@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The activation of Digital Population Identity (IKD) in North Lampung Regency in 2025 remains very low, reaching only 2.41% of the total 481,791 citizens required to possess an electronic ID (KTP-el), which is far below the national target of 30%. This condition indicates a gap between government policies in promoting the digitalization of population administration services and the level of public participation in adopting such services.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the strategy of the Department of Population and Civil Registration of North Lampung Regency in increasing the activation of Digital Population Identity.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach, analyzed using the Strategic Management theory of Wheelen and Hunger. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation, with informants selected through purposive sampling and snowball sampling. Data analysis follows the model of Miles et al., which includes data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by NVivo 12 software.* ***Result:*** *The findings indicate that the implemented strategy demonstrates varying levels of effectiveness across its dimensions. In the context and baseline dimension, the strategy is not optimal due to the low and uneven IKD activation rate. In the environmental scanning dimension, the agency has identified internal and external factors, but these have not been fully utilized to improve activation outcomes. In the strategy formulation dimension, various approaches such as socialization, outreach services, and stakeholder collaboration have been implemented; however, they remain general and not yet based on community segmentation. Meanwhile, in the evaluation and control dimension, monitoring and evaluation have been conducted regularly, but they are not yet based on measurable outcome indicators related to activation improvement.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the strategy of the Department of Population and Civil Registration of North Lampung Regency in increasing IKD activation has not been optimally implemented.*

Keywords: *Digital Population Identity; Digital Transformation; IKD Activation; Public Service; Strategy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025 masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai 2,41% dari total 481.791 penduduk wajib KTP-el, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi pelayanan kependudukan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengadopsi layanan tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta analisis berdasarkan teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan model Miles dkk yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta dibantu dengan perangkat lunak NVivo 12. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan memiliki tingkat efektivitas yang bervariasi pada setiap dimensinya. Pada dimensi konteks dan capaian, strategi belum optimal karena capaian aktivasi IKD masih rendah dan belum merata. Pada dimensi pengamatan lingkungan, dinas telah mampu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam peningkatan capaian. Pada dimensi perumusan strategi, berbagai strategi seperti sosialisasi, jemput bola, dan kolaborasi telah dilakukan, tetapi masih bersifat umum dan belum berbasis segmentasi masyarakat. Sementara itu, pada dimensi evaluasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi telah berjalan rutin, namun belum berbasis indikator hasil yang terukur terhadap peningkatan aktivasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan aktivasi IKD belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: Aktivasi IKD; Identitas Kependudukan Digital; Strategi; Pelayanan Publik; Transformasi Digital.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat secara global. Berdasarkan laporan World Population Prospects 2022 yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 284 juta jiwa pada tahun 2025. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang merata, cepat, dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah mendorong transformasi digital melalui penerapan e-government, termasuk pada sektor administrasi kependudukan (Bertot et al., 2012; Djatmiko et al., 2025). Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022. IKD merupakan bentuk digitalisasi dokumen kependudukan yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik, seperti KTP-el, Kartu Keluarga, NPWP, dan BPJS Kesehatan.

Penerapan IKD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah akses masyarakat, serta menjamin validitas dan keamanan data kependudukan. Namun demikian, tingkat adopsi IKD di Indonesia masih tergolong rendah (Naghmouchi, 2025; Hernández, 2024). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2025, dari total

208.229.142 penduduk wajib KTP-el, baru sekitar 6,59% yang telah mengaktivasi IKD, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lampung Utara. Meskipun capaian perekaman KTP-el telah mencapai 97,25%, tingkat aktivasi IKD masih sangat rendah. Dari total 481.791 penduduk wajib KTP-el, hanya 11.629 orang atau 2,41% yang telah melakukan aktivasi IKD pada tahun 2025 (Sulistya et al., 2019; Nuphanudin, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan administrasi kependudukan konvensional dengan implementasi layanan berbasis digital. Rendahnya aktivasi IKD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kendala teknis aplikasi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan aktivasi IKD secara efektif dan merata.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Utara yang masih jauh dari target nasional. Pemerintah telah mengembangkan berbagai inovasi digital dalam pelayanan kependudukan, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam mengadopsi layanan tersebut masih rendah. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji strategi peningkatan aktivasi IKD, baik di tingkat kota maupun daerah lain, serta menyoroti faktor seperti literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis sebagai hambatan utama. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji strategi peningkatan aktivasi IKD pada kabupaten dengan karakteristik wilayah yang heterogen serta tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana strategi yang tepat dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk meningkatkan aktivasi IKD secara efektif sesuai dengan kondisi lokal.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi yang diterapkan dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendorong adopsi layanan digital. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam memahami kondisi nyata di lapangan, sehingga strategi yang dirumuskan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya capaian aktivasi IKD terus berlanjut serta menghambat upaya transformasi digital dalam pelayanan publik.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi peningkatan aktivasi IKD. Penelitian Fatima dan Wibawani (2024) menunjukkan bahwa strategi jemput bola dan integrasi layanan publik efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD, meskipun masih menghadapi kendala literasi digital masyarakat. Penelitian Nurfadilah (2025) menemukan bahwa strategi manajemen yang melibatkan sosialisasi, kebijakan, dan kolaborasi belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis. Sementara itu, penelitian Braharjanto dan Subiyono (2025) menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat dan keterbatasan SDM menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi aktivasi IKD. Penelitian Ardianti dan Pradana (2025) menekankan pentingnya pendekatan jemput bola berbasis komunitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun penelitian Rahmawati dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa

keberhasilan sistem administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh literasi digital masyarakat, kesiapan infrastruktur, dan kompetensi aparatur. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan aktivasi IKD dipengaruhi oleh kombinasi strategi sosialisasi, kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta partisipasi masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji strategi peningkatan aktivasi IKD melalui berbagai perspektif. Penelitian ini menunjukkan perbedaan sekaligus kebaruan yang terletak pada beberapa aspek utama. Pendekatan teoretis yang digunakan mengacu pada manajemen strategi Wheelen dan Hunger yang menekankan analisis komprehensif meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, hingga evaluasi dan pengendalian. Pendekatan tersebut memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada tahap implementasi secara parsial. Pendekatan metodologis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung oleh analisis berbantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk memperkuat proses pengkodean dan pemetaan data. Penggunaan perangkat lunak ini memberikan nilai tambah dalam meningkatkan ketelitian analisis yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sejenis. Konteks kebijakan yang dikaji menempatkan program IKD dalam kerangka administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan agenda transformasi digital pelayanan publik. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih relevan terhadap dinamika kebijakan terkini. Karakteristik objek penelitian juga menunjukkan perbedaan, karena penelitian ini dilakukan pada tingkat kabupaten dengan kondisi wilayah yang heterogen serta tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai strategi peningkatan aktivasi IKD dengan mempertimbangkan kondisi lokal secara komprehensif dan terintegrasi.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya dari segi konteks, pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian ini dilakukan pada tingkat kabupaten dengan karakteristik wilayah yang heterogen berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen strategi untuk menganalisis proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi peningkatan aktivasi IKD. Fokus penelitian tidak hanya pada implementasi, tetapi juga pada bagaimana strategi dirumuskan berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami strategi peningkatan aktivasi IKD yang kontekstual dan berbasis kondisi lokal.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lampung Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Creswell, 2018). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui hasil atau capaian secara angka, tetapi juga memahami proses,

dinamika, serta strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan demikian, pendekatan kualitatif dinilai paling tepat untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Creswell, 2018). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, karena memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan penentuan strategi terkait program IKD. Selain itu, informan lainnya meliputi Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, staf/operator pelayanan IKD, serta masyarakat yang telah dan belum melakukan aktivasi IKD. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan maupun pemanfaatan program IKD, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah dan masyarakat), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis (audit trail) sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Selain itu, analisis data juga dibantu dengan penggunaan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengelompokkan, mengkodekan, serta memetakan temuan penelitian agar lebih sistematis.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sebagai lokasi utama penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Juli hingga Agustus 2025 yang meliputi kegiatan observasi lapangan, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen pendukung. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi aktual terkait strategi peningkatan aktivasi IKD secara objektif dan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis melakukan analisis terhadap temuan penelitian mengenai strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Utara. Analisis dilakukan berdasarkan teori manajemen strategis dari Wheelen dan Hunger yang meliputi konteks dan capaian, pengamatan lingkungan, perumusan strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta dianalisis menggunakan bantuan aplikasi NVivo 12 untuk memperkuat interpretasi data. Pendekatan analisis ini sejalan dengan konsep manajemen strategi yang menekankan pentingnya kesesuaian antara lingkungan internal dan eksternal dalam menentukan efektivitas strategi organisasi (Nurfadilah, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022–2025 masih belum mencapai target nasional sebesar 30%. Data ini menunjukkan bahwa capaian aktivasi masih belum merata dan belum optimal, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengguna IKD di seluruh wilayah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya capaian aktivasi layanan digital dipengaruhi oleh keterbatasan strategi implementasi serta rendahnya partisipasi masyarakat (Fatima & Wibawani, 2024; Braharjanto & Subiyono, 2025). Hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Capaian IKD Per Kecamatan Tahun 2022-2025

NO	WILAYAH	TOTAL
1.	Bukit Kemuning	**429**
2.	Kotabumi	**1.910**
3.	Sungkai Selatan	**387**
4.	Tanjung Raja	**219**
5.	Abung Timur	**406**
6.	Abung Barat	**337**
7.	Abung Selatan	**1.489**
8.	Sungkai Utara	**506**
9.	Kotabumi Utara	**643**
10.	Kotabumi Selatan	**3.001**
11.	Abung Tengah	**175**
12.	Abung Tinggi	**165**
13.	Abung Semuli	**335**
14.	Abung Surakarta	**228**
15.	Muara Sungkai	**134**
16.	Bunga Mayang	**258**
17.	Hulu Sungkai	**179**
18.	Sungkai Tengah	**186**
19.	Abung Pekurun	**196**
20.	Sungkai Jaya	**142**
21.	Sungkai Barat	**142**
22.	Abung Kunang	**210**
23.	Blambangan Pagar	**259**
Lampung Utara		**11.936**

Berdasarkan tabel tersebut, total capaian aktivasi IKD di Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak 11.936 pengguna, dengan capaian tertinggi berada di Kecamatan Kotabumi Selatan dan terendah di Kecamatan Sungkai Jaya dan Sungkai Barat (BPS, 2025). Data ini menunjukkan bahwa capaian aktivasi masih belum merata dan belum optimal, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengguna IKD di seluruh wilayah.

3.1. Konteks dan Capaian Strategi

Penulis melakukan analisis terhadap konteks dan capaian strategi melalui indikator capaian aktivasi, distribusi capaian, serta kondisi awal pelaksanaan program IKD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, diperoleh informasi bahwa capaian aktivasi IKD masih jauh dari target nasional. Beliau menyatakan bahwa Tahun 2025 capaian aktivasi IKD di Kabupaten Lampung Utara baru sekitar 2,41%, sementara target nasional sebesar 30%. Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain seperti Kepala Bidang dan operator IKD yang menyampaikan bahwa rendahnya capaian disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital. Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai metode seperti jemput bola ke kecamatan, kelurahan, dan sekolah. Namun demikian, pelaksanaannya belum merata dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui atau belum melakukan aktivasi IKD.

Untuk memperkuat hasil analisis, penulis menggunakan bantuan aplikasi NVivo 12 dalam memetakan temuan penelitian. Hasil visualisasi melalui project map menunjukkan bahwa aspek capaian aktivasi IKD, distribusi pengguna, serta hambatan implementasi menjadi indikator yang paling dominan dalam dimensi konteks dan capaian.

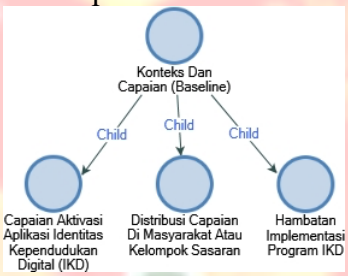

Gambar 1. Project Map Dimensi Konteks Dan Capaian (Baseline)

Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa capaian aktivasi IKD masih didominasi oleh kategori "belum tercapai target", yang memperkuat hasil wawancara bahwa capaian tahun 2025 masih berada pada angka 2,41% dari target nasional sebesar 30%.



Gambar 2. Word Cloud Dimensi Konteks dan Capaian (Baseline)

Hasil analisis menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa kata yang paling dominan dalam dimensi ini adalah "target", "sosialisasi", dan "masyarakat". Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan capaian aktual serta keterbatasan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konteks dan capaian strategi masih belum optimal karena capaian aktivasi IKD belum memenuhi target nasional serta distribusi pengguna yang belum merata di seluruh wilayah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa literasi digital masyarakat memiliki

peran penting dalam keberhasilan implementasi layanan berbasis teknologi (Rahmawati & Handayani, 2022; Hutasoit & Pribadi, 2023).

3.2 Pengamatan Lingkungan Strategi

Penulis menganalisis pengamatan lingkungan melalui kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan strategi peningkatan aktivasi IKD. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi internal organisasi meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem kerja. Kepala Dinas menyatakan bahwa Faktor internal utama adalah SDM, sarana prasarana, serta kemampuan pegawai dalam memahami kebijakan IKD. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah SDM masih terbatas, sehingga pelaksanaan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Sementara itu, kondisi eksternal berkaitan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa masih terdapat keraguan dalam menggunakan IKD, terutama terkait keamanan data dan kemampuan menggunakan teknologi digital. Salah satu informan menyatakan bahwa Saya masih ragu aktivasi karena takut data bocor dan belum terlalu paham cara menggunakan aplikasinya.

Hasil analisis menggunakan NVivo 12 melalui project map menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki keterkaitan yang kuat terhadap rendahnya capaian aktivasi IKD.

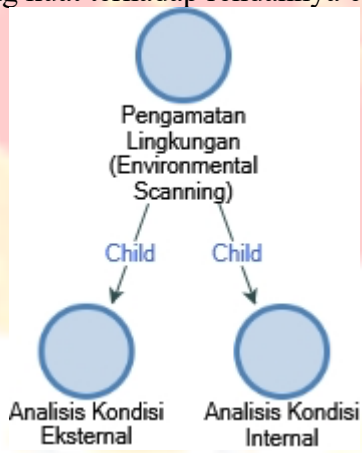

Gambar 3. Project Map Dimensi Pengamatan Lingkungan (Environmental Scanning)

Visualisasi tersebut memperlihatkan bahwa faktor eksternal seperti kepercayaan masyarakat dan tingkat literasi digital memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi, sehingga menjadi faktor dominan dalam memengaruhi keberhasilan program.



Gambar 4. Word Cloud Dimensi Pengamatan Lingkungan (Environmental Scanning)

Hasil analisis NVivo 12 menunjukkan bahwa kata yang paling dominan adalah “masyarakat”, “faktor”, dan “kepercayaan”. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal yang paling berpengaruh

adalah tingkat kepercayaan dan kesiapan masyarakat dalam menerima digitalisasi layanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengamatan lingkungan menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari faktor internal berupa keterbatasan SDM dan faktor eksternal berupa rendahnya kepercayaan serta pemahaman masyarakat terhadap IKD.

3.3 Perumusan Strategi

Penulis menganalisis perumusan strategi melalui tujuan program dan alternatif strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan utama program IKD adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi dokumen kependudukan. Kepala Dinas menyatakan bahwa Tujuan utama IKD adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital tanpa harus membawa dokumen fisik. Adapun strategi yang digunakan meliputi sosialisasi langsung, program jemput bola, pembukaan gerai layanan di Mall Pelayanan Publik, serta pemanfaatan kegiatan daerah untuk meningkatkan aktivasi IKD. Berdasarkan observasi, strategi tersebut telah dilaksanakan secara aktif, namun masih bersifat situasional dan belum merata. Pada beberapa kegiatan terlihat adanya antrean dan keterbatasan petugas, yang menunjukkan bahwa implementasi strategi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil pemetaan data menggunakan NVivo 12, strategi yang paling sering muncul adalah sosialisasi, jemput bola, dan pemanfaatan event daerah.

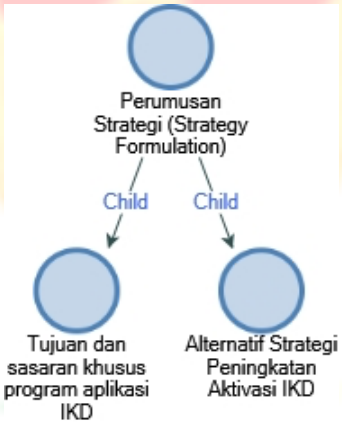

Gambar 5. Project Map Dimensi Perumusan Strategi (Strategy Formulation)

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan sudah variatif, namun masih belum mampu meningkatkan capaian secara signifikan.



Gambar 6. Word Cloud Dimensi Perumusan Strategi (Strategy Formulation)

Hasil analisis NVivo 12 menunjukkan bahwa kata dominan dalam dimensi ini adalah “masyarakat”, “dokumen”, dan “aplikasi”. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dirumuskan telah berorientasi pada kebutuhan masyarakat, namun masih memerlukan peningkatan dalam implementasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi sudah tepat dan variatif, namun pelaksanaannya belum optimal dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD secara signifikan.

3.4 Evaluasi dan Pengendalian Strategi

Penulis melakukan analisis terhadap evaluasi dan pengendalian strategi melalui proses monitoring dan penilaian capaian aktivasi IKD. Berdasarkan hasil wawancara, monitoring dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat evaluasi serta pemantauan langsung di lapangan. Kepala Dinas menyatakan bahwa Monitoring dilakukan setiap bulan untuk melihat progres dan kendala di lapangan. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa proses monitoring masih berfokus pada pelaporan kegiatan dan belum sepenuhnya berbasis pada pengukuran hasil yang terukur, seperti peningkatan jumlah aktivasi secara langsung.

Hasil visualisasi project map menunjukkan bahwa aspek monitoring dan kendala menjadi fokus utama dalam proses evaluasi.

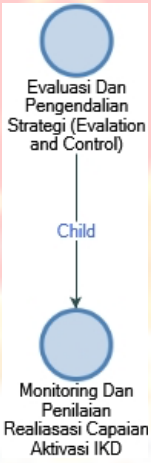

Gambar 7. Project Map Dimensi Evaluasi dan Pengendalian Strategi (Evaluation and Control)

Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada identifikasi masalah, belum sepenuhnya pada pengukuran hasil.



Gambar 8. Word Cloud Dimensi Evaluasi dan Pengendalian Strategi (Evaluation dan Control)

Hasil analisis NVivo 12 menunjukkan bahwa kata dominan dalam dimensi ini adalah “kendala”, “evaluasi”, dan “monitoring”. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi masih berfokus pada identifikasi masalah, namun belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan hasil secara konkret.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan pengendalian strategi telah berjalan, namun belum optimal dalam mengukur efektivitas strategi secara langsung terhadap peningkatan capaian aktivasi IKD. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa evaluasi yang tidak berbasis indikator kinerja akan sulit mengukur efektivitas strategi secara objektif (Julian, 2025; Ruhana et al., 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan aktivasi IKD. Keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta kesiapan sumber daya dan infrastruktur. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik memerlukan integrasi antara kebijakan, teknologi, dan kapasitas organisasi (Gatiningsih et al., 2022; Sulistya et al., 2019) .

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan program menunjukkan keterkaitan yang erat dengan temuan penelitian sebelumnya, baik dalam aspek kesamaan maupun perbedaan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi sangat dipengaruhi oleh adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta kelompok sasaran. Kolaborasi tersebut tercermin dalam keterlibatan aktif berbagai pihak dalam mendukung implementasi program di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan sinergi antar aktor yang terlibat (Dwiyanto, 2018; Gatiningsih, 2023). Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kolaborasi merupakan faktor kunci dalam mendorong efektivitas pelaksanaan strategi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dan media digital dalam mendukung pelaksanaan strategi belum berjalan secara optimal. Keterbatasan ini terlihat dari masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital, serta adanya keraguan dalam menggunakan layanan berbasis digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program berbasis teknologi (Syahbano & Gatiningsih, 2025). Strategi yang telah dirumuskan belum sepenuhnya berhasil tanpa diimbangi kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan serta ketersediaan sumber daya dari pemerintah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan strategi. Dukungan tersebut tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas, pendanaan, serta penguatan kapasitas aparatur. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana pendukung (Gatiningsih, 2015).

Perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu terlihat pada tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi pada penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian, khususnya terkait kondisi sosial masyarakat, tingkat literasi digital, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Temuan ini menegaskan bahwa strategi yang diterapkan tidak dapat diseragamkan, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal agar dapat berjalan secara efektif. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penyesuaian strategi berdasarkan konteks lokal. Keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang tepat, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengadaptasikan strategi tersebut sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Salah satu temuan yang dominan adalah adanya faktor penghambat yang berasal dari aspek sumber daya manusia dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program masih belum merata, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat juga menjadi kendala yang memengaruhi keterlibatan dalam mendukung program secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum seluruh wilayah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil yang dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dirumuskan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya (Hardiyansyah, 2018).

Penelitian ini juga menemukan adanya potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Potensi tersebut meliputi peningkatan intensitas sosialisasi, pemanfaatan teknologi secara lebih optimal, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Berbagai kendala yang ada masih dapat diatasi melalui strategi yang lebih adaptif dan kontekstual. Temuan tambahan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang bersifat dinamis. Upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada serta meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan program.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital belum berjalan secara optimal. Ketidakoptimalan tersebut terlihat pada dimensi konteks dan capaian yang menunjukkan bahwa tingkat aktivasi IKD masih rendah dan belum mencapai target nasional. Dimensi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, serta evaluasi dan pengendalian telah dilaksanakan, namun belum mampu mendorong peningkatan capaian secara signifikan. Dengan demikian, strategi yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kabupaten Lampung Utara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu serta hanya dilakukan pada satu instansi sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan pada wilayah berbeda serta menambahkan variabel seperti literasi digital untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardianti, R. N., & Pradana, G. W. (2025). Strategi peningkatan layanan aktivasi IKD melalui jemput bola. Dinamika Administrasi.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001

BPS. (2025). Jumlah penduduk Indonesia. https://www.bps.go.id

Braharjanto, A. S., & Subiyono. (2025). Implementasi strategi aktivasi identitas kependudukan digital di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/20808/

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.

Djatmiko, G. H., et al. (2025). Digital transformation and social inclusion in public services. Sustainability, 17(7), 2908. https://doi.org/10.3390/su17072908

Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.

Fatima, A., & Wibawani, S. (2024). Strategi pencapaian target aktivasi IKD. Jurnal Kebijakan Publik. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8402

Gatiningsih. (2015). Identifikasi data base kependudukan sebagai produk pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. Jurnal Dukcapil, 3(2), 107–126. http://eprints.ipdn.ac.id/2404/1/Gati%20Dukcapil%20107-126.pdf

Gatiningsih. (2023). Kebijakan administrasi kependudukan. CV Cendekia Press.

Gatiningsih, G., Djohan, T. S., Syaputra, R., & Mulianingsih, S. (2022). Strategi peningkatan kualitas pelayanan akta kematian berbasis digital di Kota Medan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1012/

Hernández, A. C. C. (2024). Analysis of the e-government development index in world regions. Procedia Computer Science, 231, 355–362. https://repositorio.cuc.edu.co/challenge

Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan dokumen paket kematian melalui program Sedudo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Jurnal Konstituen, 5(2), 106–124. https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743

Julian, E. (2025). Strategi pencapaian target kepemilikan identitas kependudukan digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/21063/

Naghmouchi, M. (2025). Perspectives on national digital identity systems. Array, 25, 100361. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100429

Nuphanudin, N. (2023). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah. Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah. http://eprints.ipdn.ac.id/

Nurfadilah, L. (2025). Manajemen strategis pemerintah daerah dalam aktivasi IKD. Universitas Brawijaya. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/238166/

Rahmawati, A. D., & Handayani, A. (2022). Analisis implementasi SIAK. Jurnal Sosial dan Humanis Sains. https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/1535/0

Ruhana, F., Nuphanudin, N., Mamonto, A., Hutasoit, W. L., & Amin. (2023). Open government: The mandate of reform that is still neglected. Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12052

Sulistya, A. Q. W., Sensuse, D. I., & Suryono, R. R. (2019). A case study of Indonesian government digital transformation. ICIMTech. https://doi.org/10.1109/ICST47872.2019.9166234

Syahbano, A., & Gatiningsih. (2025). Persepsi masyarakat terhadap transisi KTP-el ke identitas kependudukan digital di Kota Mataram. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/20913/